

Di Bawah Kutukan Eksepsionalisme (Masdar Hilmy)

Oleh: Masdar Hilmy

Sudah lebih dari dua tahun gelombang Musim Semi Arab tak kunjung membuahkan hasil positif, kecuali kekacauan demi kekacauan.

Sejak kali pertama diembuskan di Tunisia pada 18 Desember 2010, Musim Semi Arab telah merontokkan satu per satu rezim despotik-otoritarian, seperti Libya, Mesir, dan Suriah. Alih-alih mampu membawa angin perubahan ke arah lebih baik, sejumlah negara—seperti Suriah dan Mesir—bahkan tidak mampu keluar dari kubangan krisis politik berkepanjangan.

Bagi kedua negara itu, gelombang demokratisasi lebih merupakan bencana ketimbang berkah. Krisis Suriah, misalnya, telah merenggut lebih dari 82.000 jiwa. Sekalipun jumlah korban tak sebanyak di Suriah, pergolakan Mesir belum memperlihatkan tanda-tanda berakhir. Ini mengingatkan junta militer turut "memancing di air keruh" dengan menyokong salah satu pihak yang tengah bertikai. Militer telah menikam demokrasi dari belakang.

Di awal Musim Semi Arab, sebenarnya banyak pihak menaruh harapan terciptanya rezim demokrasi yang bersifat menular. Jean-Pierre Filiu (2011), misalnya, telah membuat sepuluh pelajaran penting dari gelombang demokratisasi di dunia Arab: dunia Arab bukan perkecualian. Maksudnya: jika demokrasi bisa tumbuh dan berkembang di belahan dunia lain, mengapa tak di negara-negara Arab?

Membongkar mitos

Berlarut-larutnya krisis politik di Mesir dan Suriah mengingatkan kita pada jargon teknis yang lebih banyak dikenal dalam ilmu politik: eksepsionalisme. Istilah ini sering dibaurkan dengan kulturalisme dan esensialisme. Etimologis ia bermakna 'perkecualian', terminologis merujuk pada sebuah kondisi, fitur, atau karakteristik budaya tertentu yang diatribusikan kepada kelompok atau bangsa tertentu. Ia merepresentasikan identitas budaya yang khas, melekat, built-in dalam tubuh setiap bangsa.

Terlahir dari rahim Weberian, eksepsionalisme menjelma sebagai mazhab pemikiran yang cukup berpengaruh. Mazhab ini dianut sejumlah ilmuwan politik terkemuka, seperti Talcott Parsons, Gabriel Almond & Sydney Verba, Samuel Huntington, Francis Fukuyama, serta Ronald Inglehart & Pippa Norris. Dalam konteks dunia Islam atau Timur Tengah, mazhab ini dianut ilmuwan politik, seperti Bernard Lewis, Fareed Zakariya, dan Elie Kedourie. Mereka selalu memandang peradaban tertentu berdasarkan nilai budaya yang dianutnya.

Mazhab eksepsionalisme dibangun di atas lima asumsi teoretik berikut: budaya menjadi faktor otonom yang akan membentuk tradisi sebuah peradaban; budaya bersifat tertutup, intrinsik, dan kedap terhadap perubahan; budaya cenderung lekat dengan bangsa tertentu yang tak mudah bertransmutasi; terdapat garis pemisah yang tegas di antara bangsa-bangsa akibat budaya yang berbeda; dan dimungkinkan terjadi benturan peradaban di antara budaya yang berbeda itu.

Dalam konteks budaya politik Timur Tengah, mereka memperkenalkan sebuah formula yang dikenal sebagai eksepsionalisme Arab. Para ilmuwan eksepsionalis pada umumnya memustahilkan terciptanya tradisi demokrasi di Timur Tengah akibat ketiadaan nilai-nilai budaya berbasis tradisi dan atau agama yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi.

Stepan & Robertson (2003 : 33), misalnya, menegaskan bahwa "sebuah negara nir-Arab dengan penduduk mayoritas Muslim memiliki 20 kali lipat kemungkinan menjadi kompetitif secara elektoral ketimbang sebuah negara Arab berpenduduk mayoritas Muslim". Dari 47 negara berpenduduk mayoritas Muslim, hanya enam negara mayoritas Muslim nir-Arab yang mengadopsi demokrasi sebagai sistem politik: Turki, Senegal, Indonesia, Banglades, Mali, dan Nigeria. Selebihnya masih berkubang dengan otoritarianisme dan despotisme.

Mazhab eksepsionalisme sebenarnya sudah banyak dibantah, di antaranya oleh kaum strukturalis atau instrumentalis. Mereka menyanggah kelima asumsi teoretik di atas dengan mengajukan pemikiran

